

KEBEBASAN

Oleh Nurcholish Madjid

Manusia adalah jagad kecil, suatu “mikrokosmos”, yang menjadi cermin dari jagad besar, “makrokosmos”, yang meliputi seluruh alam semesta. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan, yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau wakil-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia, oleh sesama manusia sendiri, mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Dan karena manusia itu — dalam analisa terakhir — terdiri dari individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan yang tidak terbagi-bagi, maka masing-masing perorangan itu menjadi “instansi” pertanggungjawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan Hadirat Ilahi di akhirat nanti.

Masing-masing perorangan itu pulalah yang akhirnya dituntut untuk menampilkan diri sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab yang akan memikul segala amal perbuatannya tanpa kemungkinan mendelegasikannya kepada pribadi yang lain.¹ Karena itu, nilai seorang pribadi adalah sama dengan nilai

¹ Dalam al-Qur'an terdapat penegasan-penegasan bahwa kelak di akhirat kita akan menghadapi pengadilan Ilahi mutlak selaku pribadi, tanpa ada sedikit pun kemungkinan “mendelegasikan” amal perbuatan kita kepada orang lain, meskipun orang itu sangat dekat dengan kita. Dari antara penegasan-penegasan itu, misalnya, ialah: “(Di hari kiamat), sungguh kamu sekalian datang kepada Kami (Tuhan) sebagai perorangan-perorangan, seperti halnya begitulah Kami ciptakan kamu sekalian untuk pertama kalinya. Juga telah

kemanusiaan universal, sebagaimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilainya dengan nilai kosmis seluruh alam semesta. Maka agama mengajarkan:

“Barangsiapa membunuh seseorang tanpa dosa pembunuhan atau tindakan perusakan di bumi maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia, dan barangsiapa menolong hidupnya maka bagaikan ia menolong hidup seluruh umat manusia,” (Q 5:32).

Jadi harkat dan martabat setiap perorangan atau pribadi manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil atau representasi harkat seluruh umat manusia. Maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Demikian pula sebaliknya, pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa kosmis, dosa yang amat besar.

Harkat dan martabat pribadi itu, sebagaimana telah dikemukakan tadi, dimulai dengan pemenuhan keperluan hidup primernya, berupa sandang, pangan, dan papan. Tetapi dari deretan sejumlah argumen di atas juga dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya segi kehidupan lahir tidaklah akan dengan sendirinya berarti mengantar manusia kepada dataran kehidupan yang lebih tinggi. Kehidupan universal dan kemakmuran hanyalah salah satu prasarana —

kamu tinggalkan di belakangmu segala sesuatu (harta kekayaan) yang telah Kami anugerahkan kepadamu...,” (Q 6:94). Dan firman Allah: *“Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu sekalian, dan waspadalah terhadap masa ketika tidak sedikit pun orangtua dapat menolong anaknya, dan tidak pula seorang anak mampu menolong orangtuanya...,*” (Q 31:33). Juga firman-Nya lagi: *“Waspadalah kamu sekalian terhadap masa ketika tidak sedikit pun juga seorang jiwa dapat menolong seorang jiwa yang lain, tidak pula bakal diterima perantaraan (syafaat, intercession) dari jiwa itu, juga tidak bakal dilayani bentuk penebusan apa pun dari dia, dan mereka semua tidak akan ada yang membela,”* (Q 2:48).

meskipun amat penting, jika bukannya yang paling penting — bagi pencapaian kehidupan yang lebih tinggi. Meminjam adagium kaum sufi, “Hanya orang yang mampu berjalan di tanah datar yang bakal mampu mendaki bukit.”

Namun justru ibarat orang yang mampu berlari di tanah datar tapi belum tentu tertarik untuk mendaki bukit, maka demikian pula halnya dengan orang yang telah terpenuhi kehidupan lahiriahnya: belum tentu ia tertarik untuk meningkatkan dirinya ke dataran peri-kehidupan yang lebih tinggi. Mungkin ia malah merasa puas hanya berlari-lari dan berputar-putar di tanah datar. Sungguh, justru yang banyak kita jumpai ialah adanya mereka yang memandang pemenuhan kehidupan lahir sebagai tujuan akhir dan menjadi titik ujung cita-cita hidupnya. Dalam bahasa sehari-hari, orang seperti itu biasanya disebut materialis atau bersemangat kebendaan.

Maka agama-agama senantiasa memberi peringatan, jangan sampai kita terperdaya oleh kehidupan duniawi, kehidupan rendah, kehidupan material, sehingga kita lupa akan kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih berarti dan bernilai. Agama memperingatkan bahwa harta kekayaan — juga anak dan keturunan — adalah “fitnah” atau percobaan dari Tuhan kepada kita. Janganlah kita biarkan diri kita terbuai, terpukau, dan terkecoh oleh keberhasilan lahir, kemudian kita melupakan, mengabaikan, dan meninggalkan sesuatu dalam kehidupan ini yang nilainya lebih tinggi dan lebih agung daripada segi-segi lahiriah dan jasmaniah (Q 8:28). Maka sebagai “fitnah” atau ujian dari Tuhan, harta dan keturunan harus diarahkan dan digunakan untuk memperkuat usaha menuju makna hidup yang lebih hakiki.

Kekuasaan adalah Sarana, Bukan Tujuan

Termasuk keberhasilan dalam kehidupan lahiriah itu ialah keberhasilan dalam memperoleh kekuasaan politik. Kekuasaan politik

bukanlah tujuan akhir perjalanan hidup kita menuju kebahagiaan, baik pribadi maupun bersama. Kekuasaan politik hanyalah sarana untuk mempermudah mencapai tujuan itu. Karena itu junjungan kita Nabi Muhammad *saw* pun, setelah berhasil membebaskan Makkah dari kaum musyrik Quraisy, diperintahkan Tuhan untuk bertasbih memuji-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Yaitu, untuk meningkatkan diri kepada dataran nilai kehidupan yang lebih hakiki, sebagai kelanjutan dari kesuksesan beliau meletakkan prasarana kehidupan sosial-politik.²

Sebagai bangsa Indonesia kita menyadari hal itu. Sebab semua itu merupakan tuntutan asasi dari filsafat kebangsaan dan kenegaraan kita, Pancasila. Dari filsafat itu kita meyakini bahwa hidup yang bahagia harus terlebih dahulu didasari oleh jiwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Ini berarti bahwa tidak satu pun dari kegiatan kita yang dibolehkan lepas dari kesadaran akan asal dan tujuan hidup kita, yaitu Tuhan. *“Dari Dia lah kita berasal, dan kepada-Nya lah kita akan kembali”*. Maka dalam perspektif ini, seluruh hidup kita tidak lain adalah persiapan guna menghadap ke Hadirat-Nya, dan kita semua harus berusaha untuk memperoleh perkenan atau rida-Nya.

Berusaha memperoleh perkenan atau rida Tuhan berarti berusaha menempuh hidup yang diresapi oleh rasa kebajikan dan diilhami oleh keyakinan kepada kebenaran. Berusaha memperoleh perkenan Ilahi dimulai dengan ketulusan niat dalam hati sanubari untuk mengikuti jalan yang benar dan mewujudkan kebaikan. Juga berarti bahwa usaha mencapai perkenan Ilahi berpangkal dari hati nurani, sebab inti sanubari ialah hati nurani. Sanubari adalah modal primordial kita yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada

² Setelah Nabi *saw* berhasil membebaskan Makkah, turun firman Allah: *“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika telah tiba saat kemenangan Allah dan pembebasan (Makkah) dan engkau lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohon ampunlah kepada-Nya! Sungguh Dia adalah senantiasa Maha Penerima Taubat,”* (Q 110:1-3).

kita guna dapat secara naluriiah mengetahui benar dan salah, baik dan buruk.³

Dalam lubuk hati nurani yang paling dalam — yang dapat kita nyatakan secara lahiriah lewat ucapan lisan kita — kita mewujudkan niat, bahwa kita berbuat dengan nama Allah dan bertujuan untuk rida Allah. Oleh karena itu manusia tidak mampu tampil sebagai makhluk moral, yaitu makhluk yang secara logis dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya, baik ataupun buruk, jika ia sebagai pribadi tidak memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya. Seorang pribadi yang menjalankan tindakan dan perilakunya karena terpaksa — misalnya, karena ia hidup dalam sistem sosial-politik yang tiranik, otoriter, dan menindas — bukanlah seorang yang dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya itu.

Ia tidak dapat dituntut untuk tampil sebagai makhluk moral, dan ia terbebas dari tanggung jawab, karena ia adalah makhluk terpaksa.⁴ Tetapi itu berarti bahwa ia dirampas hak dan kesempatannya untuk menampilkan dirinya secara utuh. Dan pribadi yang tidak utuh serupa itu akan dengan sendirinya terhalang dari jalan mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia menjadi manusia yang tidak lagi integral,

³ Manusia dilengkapi oleh Tuhan dengan jiwa (Arab: *nafs*), sanubari atau kalbu (Arab: *qalb*) yang bersifat terang atau cahaya (nurani, Arab: *nūrānī*), sebagai modal primordial (artinya, dibawa sejak lahir, malah belum lahir) untuk menerangi hidupnya. Beberapa penegasan dalam al-Qur'an, antara lain: "*Demi jiwa dan demi Dia yang telah menyempurnakannya, kemudian Dia ilhamkan kepada jiwa itu (pengetahuan tentang) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung siapa saja yang menjaga kesuciannya, dan sungguh merugi siapa saja yang mengotorinya,*" (Q 91:7-10).

⁴ Karena itu ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa orang yang dipaksa untuk mengikuti jalan yang tidak benar, namun hatinya menyadari ketidakbenaran itu dan masih tenteram dengan kebenaran, maka ia tidak dapat dimintai tanggung jawab, dalam arti bahwa ia terbebas dari tuntutan mempertanggungjawabkan tindakan salah yang dipaksakan kepadanya itu. Tetapi, sebaliknya, orang yang menempuh hidup tidak benar dan merasa lapang hati, yakni tidak merasa salah dan itu memang pilihannya, maka ia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatannya (lihat Q 16:106).

sehingga ia pun tidak lagi mungkin tampil sebagai khalifah Allah di bumi. Karena itu sungguh besar kezaliman orang yang merampas kebebasan orang lain melalui tindakan tiranik, otoriter, dan zalim. Karena harkat dan martabatnya, manusia adalah makhluk yang tidak boleh menindas dan tidak boleh ditindas.⁵

Kemerdekaan Nurani Pangkal Kemanusiaan Universal

Karena itu kehidupan yang utuh, integral, dan memenuhi fungsi kekhalifahan dan kemanusiaan universal di bumi, berpangkal dari kebebasan nurani. Yaitu kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan, sekalipun pemaksaan yang dilakukan atas nama kebenaran mapan (*established truth*) — sesuatu yang jelas benar dan baik. Keutuhan hidup manusia dimulai dengan adanya kebebasan padanya untuk menerima atau menolak sesuatu yang berkaitan erat dengan nilai hidup pribadinya yang mendalam. Lebih-lebih setelah mencapai tingkat peradaban seperti yang ditampilkan sejak kurang lebih 15 abad terakhir ini, kemanusiaan universal haruslah dipandang sebagai telah dewasa dan matang dalam mengambil keputusan tentang hidup nuraninya.

Seorang manusia harus dibiarkan dengan bebas bereksperimen dengan kebebasan hati nuraninya sendiri: kebebasan untuk menerima atau menolak sesuatu — baik dan buruk, benar dan salah — dengan kesediaan menanggung resikonya sendiri, juga baik dan buruk, bahagia dan sengsara. Sebab yang benar telah jelas berbeda dari yang salah, yang sejati telah jelas berlainan dari yang palsu. Manusia sejak 15 abad terakhir ini harus dipandang sebagai

⁵ Maka dalam semua bidang kehidupan, seperti ekonomi misalnya, ketentuan Tuhan ialah jangan sampai ada sistem yang menghasilkan penindasan oleh manusia atas manusia lain. Ini ditegaskan sebagai konklusi dalam firman Allah berkenaan dengan sistem ekonomi yang melahirkan penindasan, yaitu riba, demikian: "... *Kamu tidak boleh menindas, dan tidak boleh pula ditindas,*" (Q 2:279).

mahluk yang dewasa, yang perkembangan budayanya telah dapat memperkuat kemampuan primordialnya untuk mengenali yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang palsu. Tinggal ia harus membuktikan sendiri, apakah pilihannya itu membuahkan kebebasan yang lebih besar, yaitu kebebasan dari setiap bentuk tirani — termasuk kecenderungan tiranik diri sendiri — yaitu suatu kebebasan yang menjadi buah dan hasil pengenalan dan penganutan seseorang kepada yang benar dan yang sejati.⁶

⁶ Menurut Kitab Suci, setiap pribadi manusia mempunyai potensi atau kecenderungan untuk menjadi tiranik, yakni ketika ia melihat dirinya serba-berkecukupan, jadi tidak perlu lagi memerlukan sesamanya dalam masyarakat yang lebih luas. Kata lain, setiap orang akan menjadi tiranik jika kehilangan kesadaran sosialnya. Firman Allah yang relevan itu terjemahannya kurang lebih demikian: “*Ingatlah, bahwa manusia itu pasti bertindak tiranik, karena ia melihat dirinya serba-berkecukupan,*” (Q 96:6-7). Karena itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa harus dan dengan sendirinya melahirkan sikap melawan kecenderungan tiranik diri sendiri, yang antara lain berupa godaan untuk memaksakan sesuatu kepada orang lain. Sebaliknya, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa harus menghasilkan sikap-sikap berperikemanusiaan, yang antara lain sikap menghargai setiap perorangan manusia.

Masalah prinsipil ini terkait erat dengan firman Allah bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Untuk kita renungkan lebih lanjut dan mendalam, terjemah ayat itu kita kemukakan di sini: “*Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Kebenaran telah tampak nyata (perbedaannya) dari kesesatan. Maka barangsiapa menolak kekuatan tiranik (thāghūt) dan beriman kepada Allah, ia sungguh telah berpegang dengan tali (pegangan hidup) yang kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui,*” (Q 2:256). Perhatikan, betapa prinsip tidak boleh ada pemaksaan dalam agama itu dikaitkan dengan penegasan bahwa yang benar telah jelas berbeda dari yang salah, sehingga manusia dengan kebebasan dan kebersihan nuraninya tentu mampu mengenali dan menangkapnya. Juga perhatikan, betapa menolak kekuatan tiranik dikaitkan dengan iman kepada Allah, atau, dari sudut lain, beriman kepada Allah dikaitkan dengan sikap menolak dan melawan kekuatan tiranik. Dan akhirnya perhatikan, bahwa ayat itu ditutup dengan penegasan bahwa Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Artinya, berkenaan dengan prinsip dalam ayat ini, bahwa Allah mengetahui detak hati nurani seseorang, apakah ia menerima dan melakukan sesuatu karena pilihannya yang bebas dan tulus, ataukah karena keadaan terpaksa.

Karena begitu asasinya kemerdekaan nurani ini, maka biar pun seorang yang mengetahui dengan pasti tentang apa yang benar dan yang sejati — seperti para Nabi dan Rasul, misalnya — tidak diperkenankan Allah memaksakan pengetahuannya itu kepada orang lain.⁷ Mereka yang meyakini suatu kebenaran dan kesejatan, serta meyakini pula bahwa kebenaran dan kesejatan itu akan membawa keselamatan dan kebahagiaan orang lain, dibolehkan hanya sampai tingkat memberi peringatan kepada orang lain itu, dan hanya sampai kepada tingkat mengajaknya dengan hikmah-kebijaksanaan, keterangan persuasif yang penuh pengertian, argumentasi dialektis yang meyakinkan.⁸ Karena itu para Rasul pun hanya bertugas memberi peringatan seperti itu, dan sama sekali tidak diberi tugas untuk memaksa atau menguasai orang lain.⁹

Indonesia: Masalah Hak-hak Asasi

Dalam persimpangan jalan pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita yang amat penting sekarang ini, prinsip-prinsip kebebasan nurani dalam semangat kemanusiaan universal tersebut di atas

⁷ Maka Nabi Muhammad *saw* sendiri pun diperingati oleh Allah untuk tidak memaksakan agama kebenaran yang dibawakan kepada orang lain: “*Jika seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua orang di muka bumi, tanpa kecuali. Apakah engkau (Muhammad) akan memaksa manusia sehingga mereka menjadi beriman semua?!*” (Q 10:99).

⁸ Terkenal sekali firman dalam al-Qur’an bahwa ajakan Nabi Muhammad *saw* menuju kepada jalan kebenaran (jalan Allah) harus dilakukan dengan penuh hikmah-kebijaksanaan dan dengan cara penyampaian lisan yang baik dan simpatik, serta dengan argumen yang lebih unggul dan meyakinkan (lihat Q 16:125). Jadi jelas tidak boleh dipaksakan.

⁹ Cukup banyak penegasan dalam al-Qur’an bahwa Rasulullah Muhammad *saw*, hanya bertugas untuk menyampaikan pesan Ilahi, tidak untuk memaksa atau menguasai manusia untuk menerimanya. Salah satunya ialah firman Allah: “*Maka peringatkanlah! Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah seorang pemberi peringatan, bukanlah engkau orang yang menguasai (mampu memaksa) mereka,*” (Q 88:21-22).

sungguh harus mulai menjadi acuan serius bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip itu merupakan dasar dan titik-tolak bagi segenap usaha mengembangkan dan menegakkan kesadaran akan hak-hak asasi dan demokrasi, sejalan dengan tekad dan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam filsafat negara. Tidak seorang pun dari kita yang boleh dibiarkan menyisihkan hak istimewa untuk dirinya sehingga terbebas dari kewajiban memenuhi tuntutan nilai-nilai filsafat negara itu. Hak dan kewajiban setiap pribadi warga negara adalah sama di hadapan nilai kefilisafatan negara. Hak seseorang terhadap yang lain adalah kewajiban orang lain itu, dan kewajiban seseorang terhadap orang lain adalah hak orang bersangkutan.

Seperti halnya semua nilai luhur tidak dengan sendirinya terwujud dalam masyarakat tanpa kesungguhan mengusahakannya, maka demikian pula hak-hak asasi. Ia tidak akan terwujud tanpa pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga yang memiliki komitmen dan ketulusan batin untuk memperjuangkannya. Maka kini, dalam simpang jalan perjalanan bangsa ini, tindak lanjut logis dari pembangunan bangsa yang amat prinsipil antara lain ialah memperjuangkan hak-hak asasi sebagaimana dikehendaki oleh filsafat negara. Berkaitan dengan sumber-sumber kekuasaan, dalam masyarakat secara minimal harus ditegakkan hak-hak yang tak terpisahkan dari perikehidupan yang sentosa. Yaitu, hak-hak pribadi untuk hidup dan memperoleh jaminan keamanan atas hidupnya itu; hak-hak pribadi untuk tidak disiksa — baik fisik maupun mental; hak-hak pribadi untuk memperoleh pengadilan yang tidak memihak, yang fair; hak-hak pribadi untuk tidak mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Pelanggaran atas hak-hak pribadi tersebut akan merupakan pelanggaran hak asasi yang paling telanjang. Pelanggaran atas hak-hak itu juga merupakan penyelewengan yang paling gawat dari dasar dan filsafat kenegaraan kita. Dan karena hak-hak itu ada dalam konteks kekuasaan, maka usaha melindungi dan menegakkannya memerlukan sistem dan tatanan kekuasaan yang adil dan tidak

memihak kepada kepentingan diri sendiri dan golongan. Yaitu, suatu sistem kekuasaan yang tidak terpengaruh oleh perasaan suka-tidak suka; suatu kekuasaan yang sanggup menegakkan keadilan sekalipun terkena kepada diri si penguasa sendiri.¹⁰ Semua itu memerlukan sistem yang dalam dirinya terkandung mekanisme, untuk mampu mengawasi dan meluruskan dirinya sendiri, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik, dan terus lebih baik. Sistem itu kini lazim disebut demokrasi. Yaitu sistem yang dalam konteks filsafat kenegaraan kita bertitik-tolak dari jiwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa, dasar yang benar dari seluruh kegiatan manusia.

Jiwa keimanan dan ketakwaan itu melengkapi kita dengan tujuan hidup yang tinggi, transendental, dan mengatasi tujuan-tujuan hidup yang duniawi, yang *terrestrial*. Tetapi karena keimanan dan ketakwaan selamanya bersifat pribadi — justru yang paling pribadi — maka ia tidak cukup guna menciptakan masyarakat

¹⁰ Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjalankan kekuasaan harus dengan tujuan menegakkan keadilan, tanpa perasaan suka atau tidak suka, dan meskipun mengenai diri sendiri, kedua orangtua, maupun sanak kerabat. Beberapa firman Allah yang relevan, terjemahnya adalah demikian: "*Wahai sekalian orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang teguh karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu golongan membuatmu tidak adil. Tegakkanlah keadilan, itulah yang lebih dekat kepada takwa. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa pun yang kamu kerjakan,*" (Q 5:8); "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua untuk menunaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menjalankan hukum (pemerintahan) di antara manusia maka jalankan dengan adil. Sungguh Allah adalah sebaik-baik yang memberi nasehat kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat,*" (Q 4:58); "*Wahai sekalian orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang teguh dengan keadilan, sebagai saksi-saksi untuk Allah, meskipun mengenai diri kamu sendiri ataupun kedua orangtuamu dan sanak-kerabatmu. Kalaupun ia itu kaya atau miskin, Allah harus lebih didahulukan daripada mereka. Maka janganlah kamu menuruti hawa nafsu (perasaan suka-tidak suka) sehingga kamu berpaling (dari keadilan). Kalau kamu putar-balikan persoalan atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa pun yang kamu kerjakan,*" (Q 4:135). Kiranya patut sekali semua itu kita renungkan sedalam-dalamnya.

yang membahagiakan semuanya. Keimanan dan ketakwaan itu harus diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan nyata dalam masyarakat, berupa tindakan-tindakan kebajikan yang sejalan dengan semangat kemanusiaan universal, sehingga berdampak kepada kehidupan bersama.

Dan karena tindakan berdimensi sosial itu menyangkut para anggota masyarakat yang menjadi lingkungannya, jauh atau dekat, maka ia tidak dapat dipertaruhkan hanya kepada keinginan atau aspirasi pribadi. Tidak boleh diremehkan adanya kemungkinan seorang pribadi dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri dan didikte oleh *vested interest*-nya, menuju kepada tirani. Maka dari itu dalam masyarakat selalu diperlukan adanya mekanisme yang efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar dan menjadi kebaikan bersama. Dan pada urutannya, proses serupa itu memerlukan kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Karena itu, setiap pengekangan kebebasan, pencekalan, atau pelarangan berbicara dan mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntunan filsafat kenegaraan kita.

Dengan hasil pembangunan yang membuat rakyat kita semakin cerdas dan semakin mampu mengambil peran dalam kehidupan bersama sekarang ini, setiap pengekangan dan pembatasan kebebasan menyatakan pendapat harus diakhiri dengan tegas, dan kita harus menumbuhkan dalam diri kita sendiri kepercayaan yang lebih besar kepada rakyat. Janganlah kita menjadi korban dari keberhasilan pembangunan nasional kita sendiri, karena kita tidak menyadari dinamika masyarakat yang menjadi konsekuensi logisnya, kemudian kita digulung oleh gelombang dinamika perkembangan masyarakat itu.

Sampai di sini pun persoalan belum berhenti, dan tidak cukup. Tiga prinsip tadi — keimanan, keterlibatan sosial, serta kebebasan menyatakan pendapat sebagai dasar terciptanya pengawasan dan pengimbangan (*check and ballance*) — masih harus dilanjutkan dan dilengkapi dengan jiwa, semangat, dan kemampuan menahan

diri dan tabah hati untuk menerima kenyataan-kenyataan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, yaitu kenyataan-kenyataan yang akan membawa kebaikan bersama. Harus ada semangat menepiskan kepentingan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan orang banyak. Karena memang keterbukaan dan kebebasan yang sejati selalu memerlukan sikap-sikap bertanggung jawab, sikap-sikap yang bebas dari egoisme dan *vested interest*.¹¹ Sebab, seperti pernah diingatkan Bung Hatta, kebebasan yang tak terkendali akan mengundang lawan kebebasan itu sendiri, yaitu tirani. [❖]

¹¹ Empat prinsip kehidupan manusia dalam konteks sosialnya itu, yaitu keimanan yang pribadi, kegiatan berkemanusiaan yang sosial, saling mengingatkan tentang kebaikan dan kebenaran serta saling mengingatkan tentang keharusan menahan diri dan tabah, dapat kita simpulkan dari surat *al-'Ashr*, yang terjemah lengkapnya adalah kurang lebih demikian:

*“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Demi masa,
sungguh manusia pasti dalam kerugian,
kecuali mereka yang beriman,
dan yang beramal kebajikan,
lagi pula saling mengingatkan sesamanya tentang kebenaran,
dan saling mengingatkan sesamanya tentang ketabahan,”* (Q 103:1-3).